

## **Menanti Arahan Pemkot Tegaskan Selalu Imbau Agar Sekolah Tak Jual Buku**



*Sumber gambar: Kaltimpost.co.id    Rabu, 07/08/2024*

Polemik masalah jual beli buku penunjang pelajaran di beberapa sekolah negeri di Samarinda belum kunjung menemukan titik temu.

**SAMARINDA** – Senin (5/8) lalu, perwakilan masyarakat menyerahkan bukti dugaan praktek jual beli buku di sekolah kepada Asisten I Pemkot Samarinda Ridwan Tassa. Namun, janji penelusuran atas tindak lanjut laporan tersebut belum dikerjakan.

Dikonfirmasi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda Asli Nuryadin mengatakan, hingga Selasa (6/8) dirinya belum menerima laporan tersebut. Namun, dia menyebut sejak beberapa tahun belakangan kerap mengingatkan pihak sekolah baik guru atau kepala sekolah tidak menjual buku apa pun di luar yang buku utama di sekolah.

“Memang data yang dikumpulkan (perwakilan orangtua) sudah ada 30 sekolah, tapi saya belum tau sekolah mana saja. Tapi kami pasti merespons dengan mengecek, dan mohon ditunggu karena itu butuh proses, tidak bisa cepat pastinya. Kami klarifikasi kebenarannya. Tentu saat ini masih berjalan. Kalau untuk target yang jelas jalan terus, sesuai dengan tindakan permasalahannya,” ucapnya, Selasa (6/8).

Pihaknya juga sudah beberapa bulan terakhir melakukan investigasi dengan mengambil data di tiga kecamatan. Sambil mengedukasi dan mengingatkan, karena yang diingatkan bukan satu-dua orang.

“Ada ratusan ribuan siswa dan orangtua siswa di Samarinda. Itu yang kami edukasi ke sekolah,” singkatnya.

Namun, diakuinya kadang-kadang permasalahannya muncul tidak di sekolah, tetapi di kelompok paguyuban, ketika ada orangtua siswa menanyakan buku penunjang. Karena sekolah sudah diingatkan jangan jual beli buku. “Namun, yang kami tekankan agar jangan ada intimidasi baik ke siswa atau orangtua. Kalau memang ada sekolah mengintimidasi laporkan saja,” tegasnya.

“Kami juga ingatkan pihak sekolah atau guru tidak mengarahkan membeli buku di area tertentu, misalnya di gang samping sekolah,” sambungnya.

Sementara itu, terkait empat opsi solusi yang dipaparkan ke wali kota untuk mengatasi masalah ini, dirinya menyebut saat ini masih dikaji TAPD, termasuk menunggu Keputusan Wali Kota Samarinda, Andi Harun. “Tapi tidak mudah seperti membalik telapak tangan. Kami ingin suasana kondusif. Apapun opsi yang dipilih nanti, kami akan siapkan mekanismenya. Misalnya ketika memilih opsi mencetak buku penunjang sendiri, tentu Pemkot akan segera merealisasikannya,” tegasnya.

Sebelumnya, pemerintah sedang mengkaji empat opsi sebagai solusi permasalahan buku, mengingat dari laporan yang diterima walikota, untuk tingkat SD memerlukan 9 buku penunjang, sedangkan SMP perlu 10 buku. Dengan jumlah siswa sekitar 89.966 orang.

Salah satu opsinya, yakni menggunakan modul ajar digital dari kemendikbud. Pada opsi ini pemerintah juga bisa mencetak sendiri, tentu dengan kualitas berbeda dari penerbit saat ini, dan membutuhkan anggaran Rp20 miliar. “Kami meminta OPD teknis bersama TAPD mengkaji beberapa opsi, misalnya mengalokasikan anggaran APBD. Kami akan terus berupaya mencari solusi yang adil dan berkelanjutan untuk mengatasi permasalahan ini,” ucap Andi Harun. **(dra)**

#### **Sumber berita:**

1. Kaltimpost, Menanti Arahan Pemkot Tegaskan Selalu Imbau Agar Sekolah Tak Jual Buku, 07/08/24

#### **Catatan:**

1. Dalam Pasal 181 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan diatur bahwa pendidik dan tenaga kependidikan, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan.
2. Dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dijelaskan bahwa pemerintah kota wajib mengusahakan pengadaan sarana dan prasarana, alat dan media belajar,

serta buku pelajaran bagi sekolah/madrasah yang diselenggarakan oleh pemerintah kota. pemerintah kota membantu pengadaan sarana dan prasarana, alat dan media belajar, serta buku pelajaran bagi sekolah/madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat.